

REKONSTRUKSI DAN REPOSISI PENDIDIKAN ISLAM DALAM MERESPON TANTANGAN DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Moch Kalam Mollah¹

Abstract

Globalization era is the reality that we ought to face it. The ongoing changes and some problems of education as the impact of globalization must be faced and solved as well as possible both on discourse and concrete or action policy phases. Inevitably, the islamic education will be involved and insisted to be able to give a significant contribution. This paper describes urgency of the islamic education to reconstruct its self before, both in the institutional management, programs and learning aspects, and we must realize that the religious education has the important role in national education system as “core of education”. What must be reconstructed, why and how to reconstruct the islamic education? This paper answers those questions.

Kata Kunci : Reposisi, Rekonstruksi dan Respon.

A. Pendahuluan

Hingga saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan yang berat, terutama dalam bidang pendidikan. Di antara tantangan itu adalah sebagai berikut: *pertama*, globalisasi di bidang budaya, etika dan moral sebagai akibat dari kemajuan teknologi di bidang

¹ Dosen Pendidikan Agama Islam di Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS), *E-mail*: drs.kalamullah@yahoo.com

transportasi dan informasi. *Kedua*, diberlakukannya globalisasi dan perdagangan bebas, yang berarti persaingan alumni dalam pekerjaan semakin ketat. Dalam realitasnya, tenaga asing yang masuk ke negara kita semakin meningkat, sedangkan tenaga Indonesia yang dikirim ke luar negeri pada umumnya non-profesional. *Ketiga*, hasil-hasil survey internasional menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah atau bahkan selalu ditempatkan dalam posisi juru kunci jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. *Keempat*, masalah rendahnya tingkat *social-capital*. Inti dari *social capital* adalah *trust* (sikap amanah). Menurut pengamatan sementara ahli, bahwa dalam bidang *social capital* bangsa Indonesia ini hampir mencapai titik “*zero trust society*”, atau masyarakat yang sulit dipercaya, yang berarti sikap amanah (*trust*) sangat lemah. Di antara indikatornya adalah hasil survey *the Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) tahun 2004 bahwa indeks korupsi di Indonesia sudah mencapai 9,25 atau ranking pertama se Asia, bahkan pada tahun 2005 indeknya meningkat sampai 9,4. *Kelima*, akhir-akhir ini konflik-konflik dalam hubungan manusia sebagai individu ataupun kelompok bahkan bangsa berlangsung dalam eskalasi yang tinggi hingga ke tingkat *violence*, dan kasus-kasus kekerasan tersebut sering memakai legitimasi agama. Eskalasi konflik tersebut, di satu sisi merupakan unsur dinamika sosial, tetapi di sisi lain justru mengancam harmoni bahkan integrasi sosial baik lokal, nasional, regional maupun internasional. *Keenam*, Banyaknya sekolah/madrasah dan perguruan tinggi ternyata belum mampu membentuk masyarakat madani (*civil society*).

Pendidikan Islam mau tidak mau terlibat dalam mengatasi dan menyelesaikan berbagai tantangan tersebut di atas bersama dengan kekuatan-kekuatan pendidikan nasional yang lain, bahkan bersama kekuatan sosial, politik, dan ekonomi pada umumnya. Hanya saja pendidikan Islam perlu melakukan evaluasi diri terlebih dahulu atau bahkan melakukan rekonstruksi dan reposisi, untuk selanjutnya

melakukan sinkronisasi dengan kebijakan pendidikan nasional guna membebaskan bangsa dari himpitan berbagai persoalan di atas.

Masalahnya adalah apanya (dari pendidikan Islam) yang direkonstruksi dan mengapa harus rekonstruksi? Apakah selama ini konstruksi pendidikan Islam sudah rapuh dan kehilangan *élan* vitalnya sehingga perlu direkonstruksi? Apanya yang rapuh dan mengapa rapuh? Pertanyaan berikutnya adalah: perlukah dilakukan reposisi pendidikan Islam dan mengapa harus reposisi? Apakah posisi pendidikan Islam selama ini masih belum jelas atau bahkan termarginalkan sehingga perlu direposisi untuk dibawa ke sentral atau dijadikan acuan utama? Berbagai pertanyaan itulah yang perlu diperbincangkan dalam tulisan ini, meskipun jawaban-jawabannya bisa jadi akan menimbulkan kontroversi.

B. PEMBAHASAN

1. Rekonstruksi Pendidikan Islam Dalam Merespon Tantangan Dunia Pendidikan

Banyak definisi mengenai pendidikan Islam, tetapi pada intinya ada dua, yaitu: *pertama*, pendidikan Islam merupakan aktivitas pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan *niat* untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya di Indonesia, pendidikan Islam ini setidaknya-tidaknya dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) jenis, yaitu: (1) Pondok Pesantren atau Madrasah Diniyah, yang menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebut sebagai pendidikan keagamaan (Islam) formal seperti Pondok Pesantren/ Madrasah Diniyah (Ula, Wustha, 'Ulya, dan Ma'had 'Ali); (2) Madrasah dan pendidikan lanjutannya seperti IAIN/STAIN atau Universitas Islam Negeri yang bernaung di bawah Departemen Agama; (3) Pendidikan usia dini/TK, Sekolah/Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh dan/atau berada di bawah naungan yayasan dan organisasi Islam; (4) Pelajaran agama Islam di sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah, dan/atau sebagai program studi; dan (5) Pendidikan Islam

dalam keluarga atau di tempat-tempat ibadah, dan/atau di forum-forum kajian keislaman, majelis ta'lim, dan institusi-institusi lainnya yang sekarang sedang digalakkan oleh masyarakat, atau pendidikan (Islam) melalui jalur pendidikan non formal, dan informal.

Kedua, pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan dari dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Dalam pengertian yang kedua ini, pendidikan Islam bisa mencakup: (1) pendidik/guru/dosen, kepala sekolah/madrasah atau pimpinan Perguruan Tinggi dan/atau tenaga kependidikan lainnya yang melakukan dan mengembangkan aktivitas kependidikannya disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam; dan/atau (2) komponen-komponen pendidikan lainnya, seperti tujuan, materi/bahan ajar, alat/media/sumber belajar, metode, evaluasi, lingkungan/ konteks, manajemen, dan lain-lain yang disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam, atau yang berciri khas Islam.

Dari kedua pengertian pendidikan Islam tersebut di atas, maka pengertian *pertama* lebih menekankan aspek kelembagaan dan program pendidikan Islam, dan yang *kedua* lebih menekankan pada aspek *spirit* Islam yang melekat pada setiap aktivitas pendidikan. Dalam kajian ini penulis bermaksud memperbincangkan rekonstruksi pendidikan Islam dalam konteks pengertian yang *pertama*, terutama pada jenis pendidikan Madrasah dan pelajaran agama Islam di sekolah. Sedangkan upaya reposisi pendidikan Islam terutama ditekankan pada pengertian pendidikan Islam yang *kedua*.

a. Rekonstruksi Madrasah

Dalam realitas sejarahnya, madrasah tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga mereka sebenarnya sudah jauh lebih dahulu menerapkan konsep pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*). Masyarakat, baik secara individu maupun organisasi, membangun Madrasah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Tidak heran jika Madrasah yang dibangun oleh mereka bisa seadanya saja

atau memakai tempat apa adanya. Mereka didorong oleh semangat keagamaan atau dakwah, dan hasilnya pun tidak mengecewakan.

Hingga saat ini 91,4% jumlah madrasah (MI, MTs dan MA) yang ada di Indonesia adalah milik swasta, sedangkan sisanya adalah berstatus negeri. Data statistik Madrasah di Jawa Timur tahun 2006 misalnya, menunjukkan bahwa dari 6.617 MI hanya ada 2,16 % (143) yang berstatus negeri, sisanya 97,84% (6.474) berstatus swasta. Dari sejumlah MI tersebut dapat menampung peserta didik sebanyak 868.065 peserta didik, dengan rincian 27.862 peserta didik MIN dan 840.203 peserta didik MIS. Untuk MTs, dari 2.678 MTs hanya 6,72% (180) yang berstatus negeri, sedangkan sisanya 2.498 (93,27%) berstatus swasta. Dari sejumlah MTs tersebut dapat menampung peserta didik sebanyak 429.159 peserta didik, dengan rincian 96.138 peserta didik MTsN dan 333.021 peserta didik MTsS. Untuk MA, dari 1.037 MA, hanya 8,1% (84) berstatus negeri, sedangkan sisanya 953 (91,9%) berstatus swasta. Dari sejumlah MA tersebut dapat menampung peserta didik sebanyak 165.916 peserta didik, dengan rincian 50.863 peserta didik MAN dan 115.053 peserta didik MAS².

Data tersebut mengandung makna betapa tingginya semangat kemandirian masyarakat Islam dalam menyelenggarakan pendidikan Madrasah, yang lebih didorong oleh semangat keagamaan dan dakwah, sehingga mampu menampung sejumlah besar peserta didik dan sekaligus ikut mensukseskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Hanya saja, semangat keagamaan dan dakwah tersebut pada umumnya belum dibarengi dengan profesionalitas dalam manajemen Madrasah, serta belum banyak didukung oleh sumberdaya internal, baik dalam pengembangan program pendidikan (kurikulum), sistem pembelajaran, sumberdaya manusia, sumber dana maupun prasarana dan sarana yang

² Data Madrasah Di Lingkungan MAPENDA Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur, 2006.

memadai, sehingga sebagian besar proses dan hasil pendidikannya masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

Bahkan semangat keagamaan dan dakwah tersebut akhir-akhir ini harus berhadapan dengan tuntutan baru terutama menyangkut pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang diikuti dengan beberapa Permendiknas sebagai penjabaran dari PP tersebut. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI, yang terdiri atas 8 (delapan) standar, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dengan demikian, setiap madrasah dituntut untuk memenuhi standar tersebut untuk selanjutnya berusaha meningkatkan kualitasnya ke standar yang lebih tinggi.

Dalam sosialisasi kebijakan tentang Pembinaan dan Peningkatan Mutu Madrasah pada Rapat Koordinasi Pengembangan Kurikulum Madrasah, tanggal 14-16 November 2007, di Cisarua Bogor, Dirjen Pendidikan Islam menyatakan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh madrasah baik yang bersifat *internal* maupun *eksternal*.

Dari segi *internal*, tantangan yang dihadapi adalah menyangkut: (1) Mutu; penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah umumnya belum dapat melahirkan lulusan yang berkualitas; (2) Pendidik; sebagian besar tenaga pendidik dan kependidikan di madrasah belum berkualifikasi sesuai dengan tuntutan perundang-undangan; (3) Kurikulum; sebagian besar madrasah belum dapat mengimplementasikan standar isi dan belum sepenuhnya dapat mencapai standar kompetensi lulusan minimal. Persentase lulus Ujian Nasional cukup menggembirakan, kurang lebih 92%, tetapi perolehan nilai rata-rata masih rendah; (4) Manajemen; penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah, yang 91,4 % swasta, umumnya belum dikelola dengan manajemen yang profesional; (5) Sarana

prasarana; belum memadainya sarana dan prasarana pada sebagian besar madrasah; (6) Status; belum sepenuhnya percaya diri dalam pengelolaan dan penyelenggaraan dan terbatasnya peluang penerangan sehingga madrasah negeri, yang umumnya telah memenuhi standar minimal, hanya berjumlah 8,6%. Secara *eksternal*, tantangan yang dihadapi madrasah adalah menyangkut persepsi masyarakat dan pemerintah yang cenderung diskriminatif, sehingga madrasah kurang mendapatkan perhatian, termasuk dalam penyediaan anggaran, bahkan ada yang menganggap sebagai lembaga pendidikan kelas dua setelah sekolah.

Dalam rangka menghadapi kedua tantangan madrasah (internal dan eksternal) serta tantangan-tantangan dunia pendidikan tersebut di atas, maka madrasah harus berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin untuk menyiapkan dan menghasilkan lulusan yang bermutu, karena hanya lulusan bermutu yang akan mampu menciptakan pekerjaan sendiri dan/atau mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional. Lulusan yang bermutu adalah lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap dan integritas pribadi yang dapat diandalkan; (b) diakui dan memiliki daya saing di tingkat nasional, regional dan internasional. Dirjen Pendidikan Islam (2007) menetapkan tiga indikator mutu lulusan, yaitu: (1) tercapainya dan/atau terlampauinya Standar Nasional; Siswa madrasah harus dapat berprestasi dalam menempuh Ujian Nasional dan lulus dari satuan pendidikan dengan predikat minimal baik, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang unggul/favorit; (2) Kompetitif; Lulusan madrasah harus dapat berkompetisi dengan lulusan sekolah; dan (3) dapat memenuhi harapan *stakeholders*; dapat memenuhi harapan dan kebutuhan orangtua, masyarakat, dunia kerja, pemerintah, dan sebagainya.

Untuk mewujudkan lulusan tersebut, maka madrasah harus melakukan perubahan dari pengelolaan apa adanya menuju ke pengelolaan yang lebih profesional. Karena itu diperlukan upaya

rekonstruksi, dalam arti perubahan, inovasi, dan pembaharuan sebagai “kata kunci” yang perlu dijadikan titik tolak dalam mengembangkan madrasah. Untuk memenej perubahan tersebut perlu bertolak dari visi yang jelas, yang kemudian dijabarkan dalam misi, dan didukung oleh skill, insentif, sumberdaya (fisik dan non fisik, termasuk SDM), untuk selanjutnya diwujudkan dalam rencana kerja yang jelas. Dengan demikian, maka akan terjadilah perubahan. Jika salah satu aspek saja ditinggalkan, maka akan mempunyai ekses tertentu. Misalnya, jika pengembangan Madrasah tidak bertolak dari visi yang jelas, maka akan berakibat hancur. Jika visi ada tetapi misi tidak ada atau tidak jelas, maka akan berakibat bingung karena tidak tahu apa yang akan diperbuat. Jika insentif kurang diperhatikan maka akan berakibat perubahan yang lambat, demikian seterusnya³.

Rekonstruksi, perubahan dan inovasi itu sendiri hanyalah sebagai alat bukan tujuan. Apa yang dituju oleh rekonstruksi itu adalah peningkatan mutu pendidikan, sehingga masing-masing madrasah dituntut untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan secara serius dan tidak sekedarnya, ia harus mampu memberikan *quality assurance* (jaminan mutu), mampu memberikan layanan yang prima, serta mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada peserta didik, orang tua, masyarakat ataupun *stakeholders* lainnya.

Untuk mewujudkan rekonstruksi tersebut, maka ada beberapa modal dasar yang harus dimiliki oleh pemimpin madrasah, yaitu: (1) bersedia mengambil resiko; (2) selalu menginginkan pembaharuan; (3) bersedia mengatur dan mengurus; (4) mempunyai harapan yang tinggi; (5) bersikap positif; dan (6) berani tampil dan berada di muka. Pengembangan

³ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal.

madrasah berprestasi tidak bisa dilepaskan dari peran kepala madrasah yang memiliki keenam modal dasar tersebut.⁴

Jadi, rekonstruksi yang dimaksud menyangkut perubahan madrasah dari pengelolaan seadanya menuju ke perhatian pada mutu, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi, serta melakukan sinkronisasi dengan kebijakan pendidikan nasional dengan cara memenuhi standar-standar nasional yang ada, bahkan meningkatkannya ke standar yang lebih tinggi, sehingga eksistensinya diakui dan memiliki daya saing di tingkat nasional, regional maupun internasional. Madrasah merupakan salah satu institusi pendidikan Islam yang diselenggarakan dan didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam segala aktivitas pendidikannya. Mengelola madrasah berarti mengelola pendidikan Islam, yang harus bertolak dari dan menjadikan ajaran dan nilai-nilai Islam sebagai acuan utama. Beberapa ajaran dan nilai-nilai Islam yang perlu dijadikan landasan berpijak dalam manajemen madrasah adalah sebagai berikut:

Pertama, Islam adalah agama amal atau kerja (*praxis*). Inti ajarannya adalah bahwa hamba mendekati dan memperoleh ridla Allah melalui kerja atau amal saleh dan dengan memurnikan sikap penyembahan hanya kepadaNya, sebagai Firman Allah:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُهُ وَاحِدٌ ۚ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ﴿١٠٠﴾

“Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya,

⁴ *Ibid*, hal.

Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".⁵

Hal ini mengandung makna bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan “orientasi kerja” (*achievement orientation*), sebagaimana juga dinyatakan dalam ungkapan bahwa “penghargaan dalam masyarakat Jahiliyah berdasarkan keturunan, sedangkan penghargaan dalam Islam berdasarkan amal”. Tinggi atau rendahnya derajat taqwa seseorang juga ditentukan oleh prestasi kerja atau kualitas amal saleh sebagai aktualisasi dari potensi imannya. Nilai-nilai ini sepatutnya menjadi kekuatan pendorong dan etos kerja dalam manajemen madrasah.

Kedua, uraian pada point pertama tersebut menggarisbawahi adanya nilai-nilai esensial yang perlu ditegakkan atau dijadikan watak, sikap dan kebiasaan seseorang atau kelompok dalam bekerja (termasuk dalam pengelolaan madrasah), yaitu: “bekerja (memenaj/memimpin madrasah) adalah sebagai ibadah yang harus dibarengi dengan niat yang ikhlas karena mencari ridla Allah”. Di samping itu, bekerja memenaj/memimpin madrasah merupakan realisasi dari ajaran *ihsan*, yakni berbuat baik atau memberikan layanan yang terbaik kepada semua pihak disebabkan karena Allah telah berbuat baik kepada manusia dengan aneka nikmatNya, dan dilarang berbuat kerusakan dalam bentuk apapun atau layanan yang jelek, hal ini juga terdapat dalam firman Allah :

وَاتَّبِعْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ



⁵ Q.S. al-Kahfi: 110

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”⁶

Etos kerja tersebut mempunyai implikasi sebagai berikut: (1) Bahwa seseorang (manajer/pemimpin madrasah) tidak boleh bekerja dengan “sembrono”, seenaknya dan acuh tak acuh, sebab hal ini akan berarti merendahkan makna demi ridha Allah atau merendahkan Tuhan. Dalam al-Qur’an surat al-Kahfi: 110 dinyatakan, yang maksudnya bahwa: “Barangsiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya (untuk memperoleh ridla-Nya), maka hendaklah ia bekerja yang baik (bermutu), dan hendaklah dalam beribadah kepada Tuhannya itu tidak melakukan syirk, yakni mengalihkan tujuan pekerjaan selain kepada Tuhan (*al-Haqq*), yang menjadi sumber nilai intrinsik pekerjaan manusia”; (2) Setiap orang dinilai dari hasil kerjanya, (Q.S. al-Najm: 39), sehingga dalam bekerja dituntut untuk: (a) tidak memandang enteng bentuk-bentuk kerja yang dilakukan; (b) memberi makna kepada pekerjaannya itu; (c) insaf bahwa kerja adalah *mode of existence* (bentuk keberadaan) manusia; dan (d) dari segi dampaknya (baik/buruknya), kerja itu tidaklah untuk Tuhan, tetapi untuk dirinya sendiri (Q.S. Fushshilat: 46; dan Luqman: 12); (3) Bahwa seseorang (manajer/pemimpin madrasah) harus bekerja secara optimal dan komitmen terhadap proses dan hasil kerja yang bermutu atau sebaik mungkin, selaras dengan ajaran ihsan (Q.S. al-Nahl: 90); (4) Bahwa seseorang (manajer/pemimpin madrasah) harus bekerja secara efisien dan efektif atau mempunyai daya guna yang setinggi-tingginya (Q.S. al-Sajadah: 7); (5) Bahwa seseorang (manajer/pemimpin madrasah) harus mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan teliti (*itqan*), dan tidak separuh hati atau setengah-setengah, sehingga rapi,

⁶ Q.S. Al-Qasash: 77

indah, tertib dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dari bagian-bagiannya (Q.S. al-Naml: 88); (6) Bahwa seseorang (manajer/pemimpin madrasah) dituntut untuk memiliki dinamika yang tinggi, komitmen terhadap masa depan, memiliki kepekaan terhadap perkembangan masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bersikap istiqomah (Q.S. al-Syahr: 7-8; al-Dluha: 4; al-'Alaq: 1-3; al-Syura: 15).

Di sisi lain, hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor pendukung dan kunci keberhasilan bagi sekolah/madrasah berprestasi atau sukses adalah faktor kepemimpinan atau manajemen kepala sekolah/madrasah. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Edmonds yang meneliti tentang sekolah-sekolah yang selalu meningkatkan prestasi kerjanya dipimpin oleh kepala sekolah yang baik.⁷ Hasil penelitian Tobroni menunjukkan, bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara *lembaga efektif* dengan *kepemimpinan efektif*. Edmonds juga mengemukakan bahwa *organisasi yang dinamis* senantiasa dipimpin oleh *pemimpin yang baik*, yaitu pemimpin yang selalu berupaya meningkatkan prestasinya.⁸ Havelock juga menyatakan bahwa kepala sekolah adalah sebagai agen perubahan.⁹ Menemukan bahwa kepala sekolah merupakan agen bagi perbaikan sekolah. Penelitian Rutherford menyebutkan bahwa kepala sekolah yang efektif memiliki visi yang jelas, dan mampu menerjemahkannya menjadi sasaran sekolah yang berkembang menjadi harapan besar di masa depan yang difahami, dihayati dan diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Rutter dikutip Sergiovanni, menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan bagi peningkatan kualitas keluaran murid. Sedangkan menurut kajian Kyte, Sergiovanni, Greenleaf, Dubin dan Lipham,

⁷ Edmonds, *Some School Work And More Can. Social Policy*. (New York: Cassell, 1979), hal.

⁸ Tobroni, *The Spiritual Leadership, Pengefektifan Organisasi Noble Industry Melalui Prinsip-Prinsip Spiritual Etis*. (Malang: UMM Press, 2005), hal.

⁹ Hopkins & Wideen, *Alternative Perspectives On School Improvement*. (London and New York: The Falmer Press, 1984), hal.

menyebutkan bahwa kesuksesan sekolah sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah.

Ide-ide atau gagasan tentang etos kerja yang digali dari wahyu Ilahi (*ayat-ayat qawliyah*) serta hasil-hasil penelitian sebagai fenomena *kawuniyah* tersebut, sepatutnya dijadikan landasan berpijak oleh para kepala madrasah dalam mengelola madrasah yang lebih profesional, sehingga para lulusannya memiliki daya saing yang tinggi dan diakui di tingkat nasional, regional maupun internasional.

2. Rekonstruksi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah

Hingga saat ini pelaksanaan PAI yang berlangsung di sekolah masih dianggap kurang berhasil (untuk tidak mengatakan “gagal”) dalam menggarap sikap dan perilaku keberagamaan peserta didik serta membangun moral dan etika bangsa. Berbagai macam argumen yang dikemukakan untuk memperkuat statemen tersebut, antara lain adanya indikator-indikator kelemahan yang melekat pada pelaksanaan pendidikan agama di sekolah, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) PAI kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi “makna” dan “nilai” atau kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik. Dengan kata lain, pendidikan agama selama ini lebih menekankan pada aspek *knowing* dan *doing* dan belum banyak mengarah ke aspek *being*, yakni bagaimana peserta didik menjalani hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama yang diketahui (*knowing*), padahal inti pendidikan agama berada di aspek ini; (2) PAI kurang dapat berjalan bersama dan bekerjasama dengan program-program pendidikan non-agama; (3) PAI kurang mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat atau kurang ilustrasi konteks sosial budaya, dan/atau bersifat statis akontekstual dan lepas dari sejarah, sehingga peserta didik kurang

menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian¹⁰.

Persoalan tersebut sebenarnya sudah bersifat klasik, namun hingga kini belum terselesaikan dengan baik, sehingga menjadi persoalan yang berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya. Berbagai persoalan internal pendidikan agama Islam tersebut hingga kini belum terpecahkan secara memadai, tetapi di sisi lain juga sedang berhadapan dengan faktor-faktor eksternal yang antara lain berupa menguatnya pengaruh budaya *materialisme*, *konsumerisme* dan *hedonisme*, yang menyebabkan terjadinya perubahan *life-style* (gaya hidup) masyarakat dan peserta didik pada umumnya.

Memperhatikan tantangan PAI tersebut, maka rekonstruksi yang diperlukan adalah menyangkut aspek metodologi pembelajaran dari yang bersifat dogmatis-doktriner dan tradisional menuju kepada pembelajaran yang lebih dinamis-aktual dan kontekstual. Mungkin di benak kita muncul pertanyaan yang menggoda: apakah pembelajaran PAI dengan pendekatan kontekstual tidak akan mengakibatkan perubahan ajaran dan nilai-nilai dasar agama itu sendiri karena dihadapkan dengan tantangan zaman yang selalu berubah? Jika demikian, di mana letak prinsip-prinsip dasar keyakinan beragama? Menurut hemat penulis, prinsip dasar dan pokok ajaran agama secara ontologis dan aksiologis akan tetap seperti itu adanya, tetapi secara epistemologis akan bergerak sesuai dengan bentuk tantangan yang dihadapi. Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran PAI termasuk dalam wilayah epistemologis, yang titik tekannya terletak pada bagaimana proses, prosedur, dan metodologi yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan agama Islam, menghayati dan mengamalkannya.

¹⁰ Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal.

Menurut Brown, Dirkx, Amey, and Haston bahwa pembelajaran dengan pendekatan kontekstual bersumber dari pendekatan konstruktivis. Menurut teori belajar *constructivist*, bahwa individu belajar dengan cara mengkonstruksi makna melalui interaksi dengan dan menginterpretasi terhadap lingkungannya. Selanjutnya mereka menyatakan bahwa: “*The meaning of what individuals learn is coupled with their life experiences and contexts; it is constructed by the learners, not by the teachers; and learning is anchored in the context of real-life situations and problems*”,¹¹ yakni makna dari apa yang dipelajari oleh individu-individu dirangkaikan dengan konteks dan pengalaman-pengalaman hidupnya; makna tersebut dikonstruksi oleh individu (peserta didik), bukan oleh guru; dan belajar selalu dikaitkan dengan konteks masalah-masalah dan situasi-situasi riil kehidupannya. Adapun karakteristik dari pembelajaran kontekstual, sebagaimana dikemukakan oleh Clifford & Wilson adalah sebagai berikut: (1) *Emphasizes problem solving*; (2) *Recognizes that teaching and learning need to occur in multiple contexts*; (3) *Assists students in learning how to monitor their learning so that they can become self-regulated learners*; (4) *Anchors teaching in the diverse life context of students*; (5) *Encourages students to learn from each other*; (6) *Employs authentic assessment*.¹²

PAI di sekolah terdiri atas beberapa aspek, yaitu: aspek al-Qur’an dan al-hadits, keimanan/aqidah, akhlak, fiqh (hukum Islam), dan aspek tarikh (sejarah) dan kebudayaan Islam. Kelima aspek PAI ini dapat dididikkan kepada peserta didik melalui pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual, yang intinya selalu mengaitkan pembelajaran

¹¹ L. B. Brown, *Applying Constructivism in Vocational and Career Education*. Information Series No. 378. (Columbus: ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education, Center on Education and Training for Employment, College of Education, The Ohio State University, 1998), hal.

¹² Wilson M & Clifford M, “*Contextual Teaching, Professional Learning, and Student Experiences: Lessons Learned from Implementation*.” Educational Brief no. 2. (Madison: Center on Education and Work, University of Wisconsin-Madison, 2000), hal.

PAI dengan konteks dan pengalaman-pengalaman hidup peserta didik yang beraneka ragam dan/atau konteks masalah-masalah serta situasi-situasi riil kehidupannya. Melalui interaksi dengan lingkungan dan menginterpretasi terhadap pengetahuan dan pengalaman hidupnya tersebut, maka peserta didik dapat mengkonstruksi makna dan nilai-nilai Islam yang perlu diinternalisasikan dalam dirinya. Dengan demikian, pembelajaran PAI berdasarkan pendekatan kontekstual mengasumsikan bahwa laboratorium pendidikan agama Islam adalah kehidupan itu sendiri atau peristiwa-peristiwa hidup dan kehidupan yang berada di alam semesta ini, baik yang terkait dengan masalah-masalah keluarga, sosial, ekonomi, politik, budaya, ipteks maupun lingkungan alam dan sebagainya.

PAI di sekolah pada dasarnya lebih diorientasikan pada tataran *moral action*, yakni agar peserta didik tidak hanya berhenti pada tataran kompeten (*competence*), tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan ajaran dan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Lickona, bahwa untuk mendidik karakter anak diperlukan 3 (tiga) proses pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan, mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling* hingga *moral action*. Pertama, *Moral Knowing* meliputi: (1) *moral awareness*; (2) *knowing moral values*; (3) *perspective-taking*; (4) *moral reasoning*; (5) *decision making*; (6) *self-knowledge*. Kedua: *Moral Feeling*, meliputi: (1) *conscience*; (2) *self-esteem*; (3) *empathy*; (4) *loving the good*; (5) *self-control*; (6) *humility* (rendah hati). Ketiga: *Moral Action*, mencakup: (1) *competence*; (2) *will*; (3) *habit*.¹³

Melalui pendekatan pembelajaran PAI berbasis kontekstual dan proses pembinaan secara berkelanjutan mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling* hingga *moral action* tersebut, diharapkan berbagai potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek

¹³ Thomas Lickona, *Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect And Responsibility*. (New York: Bantam Books, 1991), hal.

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, serta kecerdasan spiritual maupun kecerdasan kinestetiknya. *Kecerdasan intelektual* menyangkut cerdas, pintar, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta kemampuan menentukan prioritas atau mana yang lebih bermanfaat. *Kecerdasan emosional* menyangkut kemampuan mengendalikan emosi, mengerti perasaan orang lain, senang bekerjasama, menunda kepuasan sesaat, dan berkepribadian stabil. *Kecerdasan sosial* menyangkut senang berkomunikasi, senang menolong, senang berteman, gemar berbuat sehingga orang lain senang, dan senang bekerjasama. *Kecerdasan spiritual* menyangkut kemampuan merasa selalu diawasi oleh Allah (iman), gemar berbuat *lillahi ta'ala*, disiplin beribadah *mahdlah*, sabar berikhtiar serta pandai bersyukur dan berterima kasih. Sedangkan *kecerdasan kinestetik* menyangkut kepedulian terhadap kesehatan jasmani, yakni sehat secara medis, tahan cuaca, tahan bekerjasama dan tumbuh dari rizki yang halal. Tampilnya sosok SDM yang memiliki dan mengembangkan berbagai kecerdasan itulah yang diharapkan siap menghadapi tantangan global.

Untuk mengimplementasikan pendekatan konstekstual dalam pembelajaran pendidikan agama diperlukan beberapa modal dasar, antara lain: *pertama*, perlunya pendekatan filsafat. Fazlur Rahman, menyatakan bahwa: Philosophy is however a perennial intellectual need and has to be allowed to flourish both for its own sake and for the sake of other disciplines, since it inculcates a much needed analytical-critical spirit and generates new ideas that become important intellectual tools for other sciences not least for religion and theology. Therefore a people that deprives itself of philosophy necessarily expose itself to starvation in terms of fresh ideas-in fact it commits intellectual suicide”¹⁴.

Satu hal yang patut digarisbawahi dari pernyataan Fazlur Rahman tersebut adalah bahwa orang yang meninggalkan dan mengabaikan

¹⁴ Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of An Intellectual Tradition*. (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1982), hal.

filsafat dalam memahami teks-teks agama, maka ia akan kehilangan ide-ide segar yang aktual dan kontekstual. Karena itu, pendekatan filsafat sangat diperlukan bagi orang yang ingin mengembangkan pemahaman teks-teks agama secara kontekstual. *Kedua*, perlunya memahami dan bersedia menerima beberapa pola pikir keagamaan. Setidak-tidaknya pola pikir keagamaan dalam hal hubungan antara makna dengan lafaz atau bentuk teks ada 3 aliran: (1) monoisme, bahwa antara isi (makna) dengan lafaz atau bentuk teks merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi, tidak ada kemungkinan perbedaan pendapat dalam memahami teks, karena merupakan sesuatu yang manunggal; (2) dualisme, bahwa antara isi (makna) dengan lafaz atau bentuk teks dapat dipisahkan, dalam arti masing-masing punya eksistensi tersendiri, meskipun ada hubungan tetapi hubungan tersebut tidaklah begitu kompleks; (3) pluralisme, bahwa hubungan antara isi (makna) dengan lafaz atau bentuk teks amatlah kompleks. Sebuah teks merupakan konstruk metafungsional yang terdiri atas makna ideasional, interpersonal dan tekstual yang kompleks. Jadi, bukan hanya masing-masing makna dan bentuk teks mempunyai eksistensi tersendiri, tetapi hubungan antara keduanya bersifat amat kompleks¹⁵.

2. Reposisi Pendidikan Islam Dalam Merespon Tantangan Dunia Pendidikan

Di dalam UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif *mengembangkan potensi dirinya* untuk memiliki *kekuatan spiritual keagamaan*, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam perspektif pendidikan Islam, potensi diri manusia diistilahkan dengan *fithrah* manusia. Dengan demikian, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

¹⁵ Abdullah, M. Amin, *Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius*. (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2005), hal.

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif *mengembangkan potensi dirinya (fithrah manusia)* untuk memiliki *kekuatan spiritual keagamaan.....* dan seterusnya. Bahkan menurut Hasan, upaya pendidikan di samping berusaha untuk mengembangkan potensi-potensi fithrah manusia, juga berusaha untuk menyelamatkan dan melindungi fithrah manusia, serta menyelaraskan langkah perjalanan *fithrah mukhallaqah* (fithrah yang diciptakan oleh Allah pada manusia, yang berupa naluri, potensi jismiyah, nafsiyah, aqliyah dan qalbiyah) dengan rambu-rambu *fithrah munazzalah* (fithrah yang diturunkan oleh Allah sebagai acuan hidup, yaitu agama) dalam semua aspek kehidupannya, sehingga manusia dapat lestari hidup di atas jalur kehidupan yang benar, atau di atas jalur “*aş-Sirāt al-Mustaqīm*”.

Selanjutnya pada pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada *nilai-nilai agama.....* dan seterusnya. Konsep penting ini juga turun ke dalam UU No. 14/2005 tentang Guru & Dosen, seperti pada pasal 6 dan 7. Bahkan dikembangkan menjadi pilar pertama dalam pembelajaran, yaitu belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Adanya Undang-Undang dan peraturan tersebut di atas menggarisbawahi perlunya kita mengubah pemahaman dan membangun kesadaran kita tentang posisi pendidikan Islam yang semula seolah-olah terpojokkan, bersifat eksklusif dan hanya menjadi tugas guru agama, menuju kepada upaya menjadikan pendidikan Islam sebagai “*core*” pendidikan. Dengan demikian, pendidikan Islam bukan hanya menjadi tugas guru agama saja, tetapi merupakan tugas bersama antara kepala sekolah, guru agama, guru umum, seluruh aparat sekolah, dan orang tua murid. Bahkan pendidikan Islam itu perlu dan harus dikembangkan menjadi *budaya sekolah* sebagaimana tertuang dalam tujuan pendidikan agama Islam di sekolah tersebut di atas.

Hanya saja jika kita berbicara tentang pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari umat Islam sebagai *actor* dan pengembangnya. Selama ini memang ada bermacam-macam persepsi negatif terhadap pendidikan Islam bahkan sementara pihak berusaha memojokkannya. Ia dipersepsi sebagai “eksklusif” dan berusaha memperjuangkan berdirinya “Negara Islam” serta menegakkan syariat Islam di Indonesia, dan sebagainya. Persepsi semacam ini didukung oleh kenyataan bahwa akhir-akhir ini konflik-konflik dalam hubungan manusia sebagai individu ataupun kelompok bahkan bangsa berlangsung dalam eskalasi yang tinggi hingga ke tingkat *violence*, dan kasus-kasus kekerasan tersebut sering memakai legitimasi agama (Islam).

Kenyataan tersebut mengandung makna bahwa masih banyak hal yang perlu dipikirkan kembali dalam soal keberagaman umat. Apakah beragama itu harus melihat orang lain (yang tidak sealiran) sebagai musuh, sebagai *the others*? Apakah semua titik perbedaan itu harus disikapi secara tak ramah, harus diperangi, dan harus dilawan? Jika sikap-sikap dan perilaku semacam itu yang menonjol dalam pengembangan pendidikan Islam di sekolah ataupun di masyarakat, maka wajarlah jika pendidikan Islam terpojokkan dan didudukkan dalam posisi marginal. Kenapa seseorang tidak berusaha membangun sikap positif yang mengakui bahwa orang lain yang tak sealiran, tidak sesekte, tidak seagama, adalah umat Tuhan yang sama-sama berhak hidup di bumi Tuhan ini meski berbeda.

Rasulullah mengajarkan prinsip integrasi sosial untuk membangun sebuah masyarakat madani. Islam menjadikan rujukan nilai, pengetahuan dan tindakan bagi para penganutnya untuk berta’aruf (saling mengenal, memahami atau tukar-menukar *urf*) dengan kelompok-kelompok lain di masyarakat yang berbeda latar belakang agama, sosial dan budaya, sebagaimana firman Allah :

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*¹⁶

Prinsip ini perlu ditransformasikan kembali ke dalam kerangka pengembangan pendidikan untuk menghadapi masyarakat yang sedang dilanda konflik. Pendidikan agama memang berpotensi untuk mengarah pada sikap toleran ataupun intoleran, serta berpotensi untuk mewujudkan integrasi ataupun disintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Fenomena ini akan banyak ditentukan setidaknya-tidaknya oleh: (1) pandangan teologi agama dan doktrin ajarannya; (2) sikap dan perilaku pemeluknya dalam memahami dan menghayati agama tersebut; (3) lingkungan sosio-kultural yang mengelilinginya; dan (4) peranan dan pengaruh pemuka agama, termasuk guru agama, dalam mengarahkan pengikutnya¹⁷.

Jika pandangan teologi agama dan ajaran yang dipegangi bersifat ekstrim, dibarengi dengan model pemahaman dan penghayatan agama yang simbolik, tekstual dan skriptural, karena penjelasan-penjelasan dan arahan dari para guru agama yang bersifat doktriner, *rigid* (kaku) dan mengembangkan sikap fanatisme buta, serta didukung oleh lingkungan sosio-kultural yang eksklusif, maka bisa jadi akan melahirkan sikap

¹⁶ Q. S. Al-Hujurat: 13

¹⁷ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal.

intoleran dan agama dapat berperan sebagai faktor *disintegratif* (pemecah).

Dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan, maka pengembangan pendidikan Islam di Indonesia harus mempertimbangkan kondisi bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Karena itu, pengembangan pendidikan Islam diharapkan agar tidak sampai: (1) menumbuhkan semangat fanatisme buta; (2) menumbuhkan sikap intoleran di kalangan peserta didik dan masyarakat Indonesia; dan (3) memperlemah kerukunan hidup beragama serta persatuan dan kesatuan nasional. Pengembangan pendidikan Islam - dengan demikian - diharapkan agar mampu menciptakan *ukhuwah Islamiyah* dalam arti luas, yakni persaudaraan yang bersifat Islami, bukan sekedar persaudaraan antar umat Islam sebagaimana yang selama ini difahami, tetapi juga mampu membangun persaudaraan antar sesama. Menurut Islam, semua agama harus dilindungi, dan para pemeluknya harus diberi kebebasan untuk melaksanakan agamanya. Hanya saja konsep kebebasan beragama ini lebih mencerminkan pandangan hidup, perilaku dan mentalitas “*having a religion*”. Karena itu, perlu dikembangkan dialog antar umat beragama yang lebih mencerminkan sikap, perilaku dan mentalitas “*being religious*”¹⁸.

Posisi pendidikan Islam yang sudah jelas tersebut perlu dikembangkan ke arah: (1) pendidikan Islam multikulturalis, yakni pendidikan Islam perlu dikemas dalam watak multikultural, ramah menyapa perbedaan budaya, sosial dan agama; (2) mempertegas misi *Liutammima makārim al-Akhlāq*; dan (3) spiritualisasi watak

¹⁸ M. Amin Abdullah, *Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius*. (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2005), hal.

kebangsaan, termasuk spiritualisasi berbagai aturan hidup untuk membangun bangsa yang beradab ¹⁹.

Untuk mewujudkan upaya semacam itu diperlukan beberapa modal dasar, yaitu: *pertama*, berusaha meningkatkan, memperkuat serta memperluas pengetahuan dan wawasan keislamannya. Dengan asumsi bahwa semakin tinggi pengetahuan dan wawasan keislaman seseorang akan diikuti dengan semakin tingginya sikap toleransinya. Sebaliknya, semakin rendah pengetahuan dan wawasan keislaman seseorang, maka akan semakin besar kemungkinan timbulnya hal-hal yang negatif, terutama kalau ada yang mengembus-embus dari luar. *Kedua*, keluasan pengetahuan dan wawasan tersebut akan berimplikasi pada timbulnya sikap *husnuzh-zhan* (berprasangka baik) terhadap sesama. Jika sejak semula seseorang memiliki prasangka buruk, maka segala apa yang dilakukan oleh pihak lain akan ditafsirkan jelek, sehingga menimbulkan keretakan dan konflik. Dan *ketiga*, yang paling penting lagi adalah tidak ada satu kelompok pun yang boleh mengklaim atau memonopoli kebenaran, sebagaimana tidak ada sekelompok pun yang memonopoli kesalahan.

3. Kesimpulan

Lahirnya Madrasah (sebagai institusi pendidikan Islam) yang semula lebih didorong oleh semangat keagamaan dan dakwah, serta dikelola seadanya, saat ini menghadapi tuntutan baru baik menyangkut kontribusinya dalam merespon berbagai tantangan dunia pendidikan, maupun menyangkut pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, maka pimpinan madrasah perlu melakukan rekonstruksi terutama dari aspek manajerialnya yang lebih

¹⁹ A. Malik Fadjar, *Strategi Pengembangan Pendidikan Islam Dalam Era Globalisasi*. Makalah Disampaikan sebagai Keynote Address dalam Seminar on Islam and The Challenges of Global Education in the New Millenium, The IIUM Alumni Chapter of Indonesia di Pekanbaru, tanggal 26 Januari 2003.

profesional dan mengutamakan peningkatan mutu pendidikan, mampu memberikan *quality assurance* (jaminan mutu), layanan yang prima, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat sebagai *stakeholders*, yang hal ini merupakan realisasi dari ajaran ihsan.

Dalam konteks pelaksanaan PAI di sekolah, diperlukan rekonstruksi aspek metodologi pembelajaran, dari yang bersifat dogmatis-doktriner dan tradisional menuju kepada pembelajaran yang lebih dinamis-aktual dan kontekstual. Untuk mengimplementasikan pendekatan kontekstual tersebut memerlukan beberapa modal dasar, antara lain: pendekatan filsafat dalam memahami teks-teks agama, agar tidak kehilangan ide-ide segar yang aktual dan kontekstual; serta perlunya memahami dan bersedia menerima beberapa pola pikir keagamaan.

Posisi pendidikan Islam sebenarnya sudah jelas, tetapi dalam praktiknya di lapangan kadangkala mengalami proses reduksi pemahaman dan penerapan, sehingga melahirkan sikap dan perilaku yang eksklusif dan pendidikan Islam diposisikan marginal. Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, kita perlu mengubah pemahaman dan kesadaran kita tentang posisi pendidikan Islam yang semula seolah-olah terpojokkan, bersifat eksklusif dan hanya menjadi tugas guru agama, menuju kepada upaya menjadikan pendidikan Islam sebagai “core” pendidikan. Dengan demikian, pendidikan Islam bukan hanya menjadi tugas guru agama saja, tetapi merupakan tugas bersama, bahkan perlu dikembangkan menjadi budaya sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Amin, (2005), *Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah

- Azra, Azyumardi (2003), *Agama dan Pemberantasan Korupsi*. Kompas, September 2003.
- Brown, B. L (1998), *Applying Constructivism in Vocational and Career Education*. Information Series No. 378. Columbus: ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education, Center on Education and Training for Employment, College of Education, The Ohio State University.
- Clifford, M., and Wilson, M. (2000), “*Contextual Teaching, Professional Learning, and Student Experiences: Lessons Learned from Implementation.*” Educational Brief no. 2. Madison: Center on Education and Work, University of Wisconsin-Madison, December 2000.
- Dirkx, J. M.; Amey, M.; and Haston, L. (1999), “*Context in the Contextualized Curriculum: Adult Life Worlds as Unitary or Multiplistic?*” In Proceedings of the 18th Annual Midwest Reserach to Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education, edited by A. Austin, G. E. Nynes, and R. T. Miller, pp. 79-84. St. Louis: University of Missouri at St. Louis.
- Dubin, A.E., (1991), *The Principal As Chier Executive Officer*. London: The Falmer Press.
- Edmonds, (1979), *Some School Work And More Can. Social Policy*. New York: Cassell.
- Fadjar, A. Malik, (2003), *Strategi Pengembangan Pendidikan Islam Dalam Era Globalisasi*. Makalah Disampaikan sebagai *Keynote Address* dalam Seminar *on Islam and The Challenges of Global Education in the New Millenium*, The IIUM Alumni Chapter of Indonesia di Pekanbaru, tanggal 26 Januari 2003.

- Fullan, Michael, (1982), *The Meaning of Educational Change*. USA: OISE Press, The Ontario Institute for Studies in Education.
- Hopkins & Wideen, (1984), *Alternative Perspectives On School Improvement*. London and New York: The Falmer Press.
- Lickona, Thomas, (1991), *Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect And Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Muhaimin, (2005), *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin, (2006), *Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin, (2007), *Rencana Strategis Pengembangan Madrasah (Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam)*. Malang: Lembaga Konsultasi & Pengembangan Pendidikan Islam (LKP2-I).
- Muhaimin, (2007), *Renungan dan Zikir Kontekstual: Upaya Membangun Kecerdasan Spiritual*. Malang: LKP2-I.
- Muhaimin, Sutiah, Sugeng Listyo P., (2008), *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Untuk Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Rekonstruksi dan Reposisi Pendidikan Islam

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Mendiknas Nomor 24 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan permendiknas nomor: 22 dan 23.

Rahman, Fazlur, (1982), *Islam and Modernity: Transformation of An Intellectual Tradition*. Chicago & London: The University of Chicago Press.

Tobroni, (2005), *The Spiritual Leadership, Pengefektifan Organisasi Noble Industry Melalui Prinsip-Prinsip Spiritual Etis*. Malang: UMM Press.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.